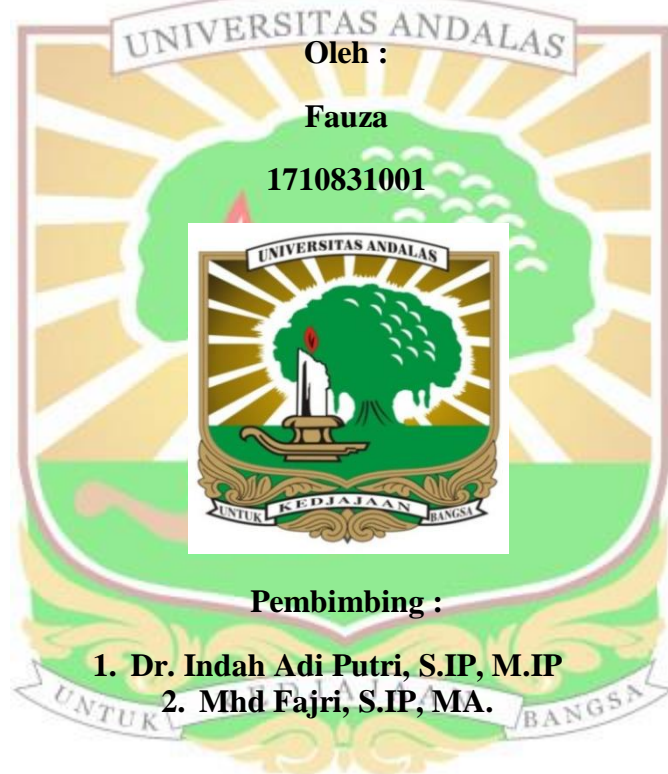


**AKUNTABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMBENTUKAN  
PANITIA PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus : Pemungutan Suara  
Ulang Pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu  
Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2022**

## ABSTRAK

**Fauza. 1710831001. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2022. Judul Skripsi “Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi kasus: pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Dibimbing Oleh: Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.IP dan Mhd Fajri, S.IP, MA.**

Pada dasarnya menciptakan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu, diantaranya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu dan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berasumsi kasus pemungutan suara ulang yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 tidak hanya di sebabkan oleh KPPS yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum, akan tetapi pemicu terjadinya kasus tersebut disebabkan karena rendahnya pengawasan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu serta mengidentifikasi dan menjelaskan dampak pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dan menggunakan lima dimensi akuntabilitas Koppel dalam menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel, hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu, Pemungutan Suara Ulang

## ABSTRACT

*Fauza. 1710831001. S1 Thesis. Department of Political Science. Faculty of Social Science and Political Science. Andalas University. Padang. 2022. Thesis title "Accountability of the General Election Commission in the Establishment of the Election Organizing Committee (Case study: Re-voting for the 2019 general election in West Pasaman Regency. Supervised by: Dr. Indah Adi Putri S.IP, M.IP and Mhd Fajri S.IP, MA*

*Basically, it is the responsibility of every election organizer to create accountability for the General Election Commission, including in the formation of an election organizing committee. The formation of the general election organizing committee in West Pasaman Regency is still influenced by certain things and has an impact on the implementation of the 2019 general election which causes re-voting cases. The voting group which is the front line in the implementation of the general election, but the trigger for this case is due to the low process of explain and analyze the accountability of the election management committee and to identify and explain the impact of the formation of the election management committee. This study uses a qualitative approach with an instrumental case study method and uses Koppel's five dimensions of accountability in analyzing this research. The results of this study indicate that in the formation of the election management committee on West Pasaman Regency the implementation of the five dimensions of Koppel accountability, only the transparency dimension can be properly applied. This can be seen from the low supervision carried out on the formation of the election management committee which effects the quality of the voting group so that it has an impact on cases of re-voting for the 2019 general election in West Pasaman Regency.*

**Keywords :** *Accountability, Election Organizing Committee, Re-voting*

